

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN GOWA

LISKA FEBRIANTI



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN GOWA

**Sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**

Disusun dan diajukan oleh :

**LISKA FEBRIANTI
A111 14 031**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN GOWA

disusun dan diajukan oleh :

LISKA FEBRIANTI
A111 14 031

telah dipetahankan dalam sidang ujian Skripsi

Makassar, 16 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Agussalim, SE., M.Si.
Nip. 19670817 199103 1 006

Pembimbing II



Dr. Hamrullah, SE., M.Si.
Nip. 19681221 199512 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si. CWM®.
Nip. 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN GOWA

disusun dan diajukan oleh

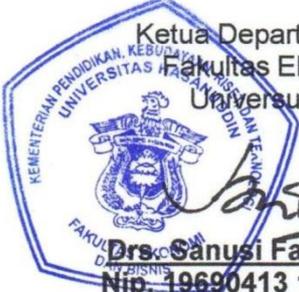
LISKA FEBRIANTI
A111 14 031

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **16 Juli 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Agussalim, SE., M.Si.	Ketua	1. 
2. Dr. Hamrullah, SE., M.Si.CSF.	Sekretaris	2. 
3. Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CWM®.	Anggota	3. 
4. Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., M.Si., CWM®.	Anggota	4. 
5. .Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si	Anggota	5. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Drs. Sanusi Fattah, SE., M.Si. CWM®.
Nip. 19690413 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **LISKA FEBRIANTI**

Nomor Pokok : A11114031

Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNHAS

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN GOWA** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 06 Agustus 2021

Yang menyatakan



(Liska Febrianti)

No. Pokok : A11114031

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang dicurahkan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN GOWA”**. Skripsi ini tersusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, terima kasih kalian telah menjadi orang tua terbaik yang senantiasa mendoakan, membimbing, mengajari serta memberi dukungan penuh kepada peneliti sehingga tercipta skripsi ini. Dalam kesempatan ini, peneliti juga merasa wajib hukumnya menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga atas bantuan beberapa pihak, yakni kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Mahlia Muis, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Kartini, SE., M.Si., AK. C.A, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi

dan Bisnis, dan Bapak Dr. Madris DPS., M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

3. Bapak Dr. Abd. Hamid Paddu, MA. selaku Penasehat Akademik peneliti, terima kasih sudah memberi banyak arahan kepada peneliti selama masa kuliah.
4. Bapak Dr. Agussalim, SE.,M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Hamrullah, SE.,M.Si.,CSF. selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
5. Dosen penguji: Ibu Dr. Fatmawati, SE.,M.,Si, Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA dan Bapak Dr. Sultan Suhab, SE.,M.Si Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan serta saran dan kritik-konstruktif yang diberikan kepada peneliti demi kelayakan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si dan Ibu Dr. Dwiana Sari Saudi, SE. M.Si. selaku ketua dan sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin yang baru, tidak lupa pula Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D selaku mantan ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Bapak Dr. Ir. Muhammad Jibril Tajibu, SE., M.Si. selaku mantan sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah menginspirasi dan bersedia membagi ilmunya kepada penulis, terima kasih atas pembelajaran dan bantuan selama tahun kuliah penulis.

8. Segenap Pegawai Akademik, Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Ibu Saharibulan, Terima kasih telah membantu dalam pengurusan administrasi selama masa studi penulis.
9. Kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberi kemudahan dalam pengambilan data.
10. Saudara-saudara seangkatan 2014 “Primes”, saudara dari maba hingga saat ini yang sudah banyak memberi pengalaman, kenangan yang begitu sangat berarti bagi peneliti, meskipun peneliti jarang sekali berkumpul dengan kalian tapi percayalah kalian telah memberi warna selama proses perkuliahan ini. Maaf jika terlalu banyak kesalahan selama ini.
11. Terima kasih untuk sahabat terloveku Irna, Astycuu, dan Antycuu yang membuat masa-masa kampus terasa indah menyenangkan dengan adanya kalian dan selalu ada disaat susah heheh. Terima kasih juga buat teman-teman ku : Kurni, Reski, Umi, Indah, Icca, Imam, Qory, Uci, Asma, Rura, Sukma, Anty Belopa, dan Rika.
12. Terima Kasih juga buat nenekku, om pata, dg. Caya, lisda, nurul, dade, najwa, a’mi dan masih banyak lagi yang belum bisa penulis sebutkan, pokoknya terima kasih yang banyak.
13. Terima kasih juga buat teman-teman KKN Gel. 96 mangarabombang Kab. Takalar Kelurahan Mangadu. Teruntuk teman posko yang saya sayangi Korcam, Binsar, kak Fahtur, Wana, Dina, dan Nadya terima kasih telah memperindah hari-hari masa KKN.
14. Untuk Himajie Unhas, terima kasih sudah menjadi tempat belajar bagi peneliti selama ini.

15. Dan tentunya semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah membantu kelancaran skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama yang ingin melanjutkan ataupun memperbaiki tulisan yang terkait dengan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 17 Agustus 2021

Liska Febrianti

ABSTRAK

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Gowa

**Liska Febrianti
Agussalim
Hamrullah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengangguran, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Gowa, untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Gowa, untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Gowa, dan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Gowa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan teknik pengumpulan data melalui dokumen dengan menggunakan alat analisis regresi. Hasil penelitian menemukan bahwa pengangguran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mempunyai pengaruh yang negative dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mempunyai pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Gowa dengan periode pengamatan 2005-2019.

Kata Kunci : pengangguran, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan.

ABSTRACT

Analysis of Influencing Factors Poverty Level in Gowa Kabupaten Regency

**Liska Febrianti
Agussalim
Hamrullah**

This study aims to determine the effect of unemployment, government spending on the education sector, government spending on the health sector, and economic growth on poverty levels in Gowa Regency. To determine the effect of unemployment on poverty levels in Gowa district, to determine the effect of government spending on the education sector on poverty levels in Gowa district, to determine the effect of health sector government spending on poverty levels in Gowa district, and to determine the effect of economic growth on poverty levels in Gowa district. Gowa. To achieve this goal, the technique of collecting data through documents using a regression analysis tool is used. The results of the study found that unemployment had a positive and significant effect on the poverty level, government spending in the education sector had a negative and insignificant effect on the poverty level, government spending on the health sector had a negative and insignificant effect on the poverty level, and economic growth had a negative effect. and not significant to the poverty rate in Gowa district with the 2005-2019 observation period.

Keywords: unemployment, government spending, economic growth, and poverty level.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tinjauan Konseptual	12
2.1.1. Kemiskinan.....	12
2.1.1.1 Teori Kemiskinan	13
2.1.1.2 Penyebab Kemiskinan	14
2.1.1.3 Ukuran Kemiskinan	15
2.1.2. Pengangguran.....	16
2.1.2.1 Penyebab Pengangguran.....	17
2.1.2.2 Jenis-Jenis Pengangguran	18
2.1.3. Pengeluaran Pemerintah.....	18
2.1.3.1 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan.....	20
2.1.3.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	21
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi.....	21

2.1.5. Hubungan Antar Variabel	25
2.1.5.1 Hubungan antara Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan	25
2.1.5.2 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan	25
2.1.5.3 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan	27
2.1.5.4 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan	28
2.2. Studi Empiris.....	29
2.3. Kerangka Pemikiran.....	32
2.4. Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Rancangan Penelitian	35
3.2. Lokasi Penelitian	35
3.3. Jenis dan Sumber Data	35
3.4. Metode Pengumpulan Data	35
3.5. Metode Analisis	36
3.6. Uji Asumsi Klasik	37
3.6.1. Uji Normalitas	37
3.6.2. Uji Multikolinearitas	37
3.6.3. Uji Heteroskedastisitas	38
3.6.4. Uji Autokorelasi	38
3.7. Uji Kesesuaian	38
3.7.1. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	38
3.7.2. Uji Statistik F	39
3.7.3. Uji Statistik t.....	39
3.8. Definisi Operasional Variabel	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1. Aspek Geografi dan demografi	42

4.1.2. Kondisi Variabel Makro Ekonomi.....	45
2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto.....	45
4.2 Hasil Penelitian	46
4.2.1. Deskripsi Variabel Penelitian	46
4.2.2. Statistik Deskriptif.....	53
4.2.3. Analisis Uji Asumsi Klasik.....	55
4.2.4. Analisis Regresi Linear Berganda	58
4.2.5. Pengujian Hipotesis.....	61
4.3 Pembahasan	62
BAB V PENUTUP.....	67
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2017	4
1.2. Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gowa Tahun 2007-2016.....	5
1.3. Perbandingan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Pariwisata Kabupaten Gowa 2012-2017 (Milyar Rupiah)	8
4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2015-2019	44
4.2. PDRB Kabupaten Gowa atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017	45
4.3. Data Tingkat Pengangguran di Kabupaten Gowa Tahun 2005-2019	46
4.4. Pertumbuhan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Gowa Tahun 2005-2019	47
4.5. Data Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Gowa Tahun 2005-2019	48
4.6. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Gowa Tahun 2005-2019	49
4.7. Data Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Gowa Tahun 2005-2019	50
4.8. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gowa Tahun 2005-2019	51
4.9. Data Kemiskinan di Kabupaten Gowa Tahun 2005-2019	52
4.10. Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gowa Tahun 2005-2019	53
4.11. Statistik Deskriptif	54
4.12. Hasil Uji Normalitas dengan One Sample Smirnov Test.....	55
4.13. Hasil Uji Multikolinieritas	56
4.14. Uji Heteroskedasditas dengan Metode Glejser.....	57
4.15. Uji Autokorelasi.....	57
4.16. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	58
4.17. Model Summary	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pimikiran	33
4.1. Peta Administrasi Kabupaten Gowa	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir M. dkk, 2008).

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup, (Adit, 2010).

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus ada solusi atau kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang rumit dan kompleks serta bersifat multidimensional. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat untuk pengentasan kemiskinan pun harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Istilah kemiskinan adalah ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi

kebutuhan atau kemakmuran ekonomi yang sesuai dengan standar hidup disuatu wilayah tertentu (Siregar, 2008).

Menurut para ahli ekonomi (Arsyad, 2010) kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensial. Kemiskinan yang bersifat multidimensial dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan yang rendah. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Dilain sisi, kemiskinan juga dikatakan sebagai persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Wijayanti, 2005).

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan bagi dinas sosial mendefinisikan orang miskin adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak bagi kemanusiaan dan mereka yang sudah mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.

Salah satu akar permasalahan kemiskinan yaitu jumlah penduduk yang tinggi. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang tinggi. Menurut Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk menunjang tambahan permintaan, namun disisi lain kenaikan jumlah penduduk yang tinggi dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2003) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan permintaan. Dengan demikian, tumbuhnya jumlah penduduk justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula memperendah biaya produksi. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus berproduksi. Tetapi keadaan ini hanya sementara sifatnya, sebab permintaan efektif (*effective demand*) akan semakin berkurang karena pendapatan buruh juga semakin berkurang.

Akar permasalahan kemiskinan kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggi adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja yang tercipta tersebut, sehingga terciptalah pengangguran yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya (Sukirno, 2004). Sedangkan menurut Mankiw (2006), pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat

pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud, jika tidak maka akan terjadi pengangguran. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat pendapatan masyarakat dan dengan begitu akan memberikan dampak domino mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turun tingkat kemakmuran masyarakat karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan dan akan menimbulkan masalah lain yaitu kekacauan politik dan sosial (Sukirno, 2010).

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Gowa tahun 2013-2017:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Kota Regency/City	2013	2014	2015	2016	2017
Kepulauan Selayar	18,20	16,95	16,90	17,21	17,62
Bulukumba	36,70	34,19	33,36	33,25	33,10
Bantaeng	18,90	17,66	17,55	17,53	17,91
Jeneponto	58,10	54,15	53,87	55,32	55,35
Takalar	29,30	27,37	27,12	27,05	26,99
Gowa	61,00	57,03	59,47	61,52	62,77
Sinjai	24,30	22,63	21,99	22,51	22,25
Maros	43,10	40,13	40,08	39,02	38,50
Pangkajene Kepulauan	56,40	52,60	53,85	52,86	53,38
Barru	17,50	16,60	16,10	16,24	16,76
Bone	87,70	80,46	75,01	75,09	77,13
Soppeng	21,30	19,78	18,88	19,12	18,76
Wajo	31,90	30,34	30,08	29,46	29,19
Sidrap	17,90	16,72	16,03	15,92	15,72
Pinrang	32,10	29,92	30,51	31,28	31,43
Enrekang	29,70	27,60	27,60	26,98	26,71
Luwu	52,00	48,53	48,64	50,58	49,80
Tana Toraja	31,30	29,09	28,59	28,42	29,18
Luwu Utara	46,20	43,02	41,89	43,75	44,04
Luwu Timur	22,20	20,78	19,67	21,08	21,94
Toraja Utara	36,80	33,88	34,37	33,02	32,85
Makassar	66,40	64,23	63,24	66,78	68,19
Pare-Pare	8,60	8,07	8,41	8,02	8,07
Palopo	15,50	14,59	14,51	15,02	15,44
Sulawesi Selatan	812,30	863,10	806,32	807,03	813,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Gowa masih relatif tinggi. Karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Berikut data jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin Kabupaten Gowa tahun 2007-2016 yang diperoleh dari BPS.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gowa Tahun 2007-2016.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2007	83.95	14.13
2008	77.20	12.79
2009	67.01	10.93
2010	62.10	9.49
2011	56.56	8.55
2012	54.60	8.05
2013	61.00	8.73
2014	57.03	8.00
2015	59.47	8.27
2016	61.54	8.40

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan tabel 1.2 secara umum jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gowa berfluktuasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya kemiskinan di suatu wilayah diantaranya, yaitu banyaknya jumlah penduduk yang mendiami wilayah tersebut.

Penumpukan jumlah angkatan kerja tentu akan memberikan beban tambahan bagi perekonomian suatu negara apabila tidak disertai dengan perluasan dan penciptaan lapangan kerjanya. Jika lowongan kerja baru tidak bisa menampung semua angkatan kerja baru maka akan memperpanjang barisan pengangguran yang sudah ada (Dumairy, 1997). Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika pengangguran dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama. Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin (Arsyad, 2010).

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan, kesehatan merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Bastias, 2010).

Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah.

Pemerintah menggunakannya untuk mengelola perekonomian negara. Pengeluaran pemerintah atau disebut belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang (Suparmoko, 2003).

Sektor pengeluaran pemerintah yang dianggap penting dalam meningkatkan kualitas SDM yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Alokasi anggaran fungsi pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara (Kemenkeu, 2017). Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Kemenkeu, 2017). Sektor ekonomi memiliki cakupan yang sangat luas sehingga menfokuskan hanya pada salah satu subsektornya. Sehingga sektor pertanian sangat cocok di bahas karena mengingat sektor pertanian merupakan sektor unggulan dan sebagian besar penduduk kabupaten Gowa bekerja di sektor pertanian.

Pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun terlihat bahwa mengalami tren naik, ini mengindikasikan bahwa meningkatnya peranan pemerintah dalam sektor ekonomi. Dumairy (1997) menyebutkan bahwa pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu tidak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Ini bukan berarti pemerintah ikut berbisnis, melainkan pemerintah harus berkontribusi menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum.

Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar untuk membentuk modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan ekonomi yang tidak lain merupakan investasi dalam jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk, dimana pertumbuhan produktivitas penduduk tersebut merupakan motor penggerak (*engine of growth*) pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk itu sendiri (Sitepu dan Sinaga, 2004).

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah perbandingan di beberapa sector pengeluaran pemerintah yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan.

Tabel 1.3. Perbandingan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Pariwisata Kabupaten Gowa 2012-2017 (Milyar Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pendidikan	Pengeluaran Kesehatan	Perlindungan Sosial	Pariwisata & Budaya
2012	394.090	96.666	15.962	3.035
2013	467.038	107.662	18.104	12.030
2014	516.288	123.000	16.289	12.659
2015	583.990	151.044	15.605	4.744
2016	574.454	228.387	19.574	5.101
2017	496.775	246.838	17.100	6.11

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan

Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan pada tahun 2012-2017 meningkat dari tahun ketahun, artinya pemerintah Kabupaten Gowa cukup memprioritaskan pendidikan dan kesehatan masyarakatnya. Pengeluaran disektor pendidikan dan kesehatan terlihat paling mendominasi jika di banding dengan sektor lain. Namun, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gowa justru mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2016 dan 2017 ini.

Wujud konkrit dari adanya campur tangan pemerintah yaitu dengan adanya komponen pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi, dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata (Amalia, 2015). Pengeluaran pemerintah yang digambarkan pada APBN pada prinsipnya bertujuan untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

World Bank dalam Laporan Monitoring Global tahun 2005 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memainkan peran sentral dalam upaya menurunkan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan global. Bisa dikatakan bahwa pengurangan penduduk miskin tidak mungkin dilakukan jika ekonomi tidak berkembang. Pertumbuhan ekonomi adalah syarat utama dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat penting untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, walaupun pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri untuk mengentaskan kemiskinan, tetap pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama untuk mengentaskan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2004).

Dari pembahasan adalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gowa”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa?
2. Apakah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa?
3. Apakah pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gowa.
4. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gowa.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut:

1. Digunakan sebagai salah satu sumber informasi dan bahan pertimbangan kepada Pemerintah maupun instansi yang terkait dalam pengambilan kebijakan.
2. Digunakan sebagai salah satu bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai hal berkaitan dan relevan dengan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konseptual

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah fenomena yang sering kali dijumpai dalam bermasyarakat. Kemiskinan juga sering dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, tetapi statistik angka kemiskinan cenderung semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat. Rendahnya tingkat kehidupan dijadikan sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu rantai dalam lingkaran kemiskinan (Ala, 2007).

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Pendekatan ini dihitung menggunakan *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Jadi, dalam pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Todaro (2006) mengatakan besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (*poverty line*). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relative.

Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah “garis kemiskinan internasional”, garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US\$1 atau \$2 per hari dalam dolar paritas daya beli (PPP). Sedangkan, kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

2.1.1.1 Teori Kemiskinan

Nurkse menjelaskan dua lingkaran perangkap kemiskinan dari segi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Segi penawaran menjelaskan bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang rendah akibat tingkat produktivitas rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Rendahnya kemampuan menabung masyarakat menyebabkan tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah, sehingga terjadi kekurangan modal dan dengan demikian tingkat produktivitas juga akan rendah. Begitu seterusnya. Sedangkan dari segi permintaan menjelaskan di negara-negara yang miskin rangsangan untuk menanamkan modal sangat rendah karena keterbatasan luas pasar untuk berbagai jenis barang. Hal ini disebabkan pendapatan masyarakat yang sangat rendah karena tingkat produktivitasnya yang juga rendah, sebagai akibat dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan kekurangan rangsangan untuk menanamkan modal. Begitu seterusnya (Kuncoro, 2006).

2.1.1.2 Penyebab Kemiskinan

Sharp (1996) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu: pertama, Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang; kedua, Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia; ketiga, Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal (Kuncoro, 2006).

Menurut Samuelson dan Nordhous (2004) bahwa penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan. Menurut Kuncoro (2006) sebagai berikut : 1). Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. 2). Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga akan rendah, upahnya pun rendah. 3). kemiskinan muncul karena adanya akses modal.

Masalah kemiskinan dapat ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (antara lain angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan dan ekonomi (komsumsi per kapita). Kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya

kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik sosial, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak dasar masyarakat miskin, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain, pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan pendapatan, pendekatan kemampuan dasar, dan pendekatan objektif dan subjektif (Bappenas, 2004).

2.1.1.3 Ukuran Kemiskinan

Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan pada norma tertentu, pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi, (*consumption-based poverty line*) terdiri dari dua elemen, yaitu, 1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya, 2) jumlah kebutuhan lainnya yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kebutuhan masyarakat sehari-hari. Bagian pertama sangat relatif jelas. Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lainnya dihitung dengan melihat harga-harga makanan yang menjadi menu golongan miskin, sedangkan yang kedua sifatnya lebih subyektif (Kuncoro, 2006).

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp7.057 per orang per hari yang berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Untuk

pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse, secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat atau negara sedangkan kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya daripada lingkungan yang berasal dari orang tersebut. Dengan kata lain, walaupun pendapatan yang diperoleh sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin (Nurkse dalam Arsyad, 2010).

2.1.2 Pengangguran

Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Dari tahun ketahun pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengatasi kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan. Apalagi di era globalisasi ini persaingan tenaga kerja semakin ketat terutama karena dibukanya perdagangan bebas yang memudahkan penawaran tenaga kerja asing yang diyakini lebih berkualitas masuk ke dalam negeri (Sukirno, 2004).

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang sedang aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkauan upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan satu usaha atau penduduk yang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja (BPS, 2010).

2.1.2.1 Penyebab Pengangguran

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut: 1). Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja, ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia; 2). Struktur lapangan kerja tidak seimbang; 3). Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi; 4). Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia; 5). Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang (Sukirno, 2004).

2.1.2.2 Jenis-jenis Pengangguran

Berdasarkan penyebabnya pengangguran terdiri dari beberapa jenis, diantaranya: a). Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi karena atas perubahan dan dinamika ekonomi; b) Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim sehingga mempengaruhi jumlah pekerjaan yang tersedia di beberapa industri seperti sektor pertanian; c)

Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang terjadi karena berkurangnya permintaan barang dan jasa; d) Pengangguran struktural adalah pengangguran yang muncul akibat perubahan struktur ekonomi; e) Pengangguran sukarela adalah pengangguran yang terjadi karena adanya orang yang sesungguhnya masih dapat bekerja tetapi dengan sukarela dia tidak mau bekerja karena mungkin sudah cukup dengan kekayaan yang dimiliki; f) Pengangguran deflasioner adalah pengangguran yang disebabkan karena lowongan pekerjaan tidak cukup untuk menampung pencari kerja; g) Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan karena kemajuan teknologi yakni pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. (Wikipedia, 2014).

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Algifari, 1998) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi lebih besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Ilyas (1989) pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Soediyono (1992) Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa hanya disebut pengeluaran pemerintah, *government expenditure* atau *government purchase* meliputi semua

pengeluaran dimana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Dari beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai konsumsi pemerintah, kegiatan-kegiatan dan pengeluaran lainnya guna tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Algifari, 1998).

Pengeluaran pemerintah versi Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + X - M$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996).

Peacock dan Wiseman (1994) mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya. Di sisi lain masyarakat memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika pajak terus dinaikkan. Mempertimbangkan teori pemungutan suara dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam keadaan

normal meningkatnya GDP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Akibat adanya keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif untuk peningkatan penerimaan negara. Jika tarif pajak dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

2.1.3.1 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Belanja pendidikan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengalokasian dana pendidikan di sebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Muliza, dkk, 2017).

2.1.3.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat

kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, memadai, terjangkau dan berkualitas (Widodo, 2010).

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik. Beberapa perkembangan ekonomi fisik yang terjadi di suatu negara adalah penambahan produksi barang dan jasa, dan perkembangan infrastruktur. Semua hal tersebut biasanya diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara dalam periode tertentu (Todaro, 2003).

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa. Menurut Badan Pusat Statistik (2008) angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan neto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu: a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, b) Konsumsi pemerintah, c) Pembentukan modal tetap domestik bruto, d) Perubahan stok dan e) Ekspor netto.

Menurut Kuncoro (2006) pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, Kabupaten, atau kota.

Menurut Todaro dan Smith (2006), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. **Akumulasi modal** termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (*human resources*). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Pendidikan formal, program pendidikan dan pelatihan kerja perlu lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga-tenaga terdidik dan sumber daya manusia yang terampil.
2. **Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.** Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja (*labor force*) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.
3. **Kemajuan Teknologi.** Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni: (a) kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama, (b) kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (*labor saving*) atau hemat modal (*capital saving*), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa

dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama, dan (c) kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

Menurut Kuznet (dikutip dari Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

2.1.5 Hubungan antar Variabel

2.1.5.1 Hubungan antara Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Terhadap hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Salah satu faktor penting yang melakukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat akan mencapai titik maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Terjadinya pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat dan akan berakhir pada kemiskinan (Sukirno, 2010).

Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk pada pemerataan distribusi pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak akan dapat memperoleh pendapatan. Maka semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Ditinjau dari segi mikro, apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan, berbagai masalah akan timbul. Pertama, keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan perbelanjaan. Kedua,

pengangguran mempunyai kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan. Masalah tersebut sangatlah erat hubungannya dengan masalah kemiskinan.

2.1.5.2 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan

Asumsi yang digunakan dalam teori *human capital* adalah bahwa pendidikan formal merupakan factor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori *human capital* dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber manusia yang adapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini dipercaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan system pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Menurut Sitepu dan Sinaga (2014) dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas tenaga kerja kaum miskin dapat disebabkan oleh karena rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan, oleh karena itu

perhatian yang besar untuk bidang pendidikan sangat penting untuk mengurangi kemiskinan di suatu daerah atau Negara.

Menurut Simmons (dalam Todaro, 2013), pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Sitepu dan Sinaga, 2014).

Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan, sesuai dengan peranan pemerintah yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Peranan tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi jika tujuan pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan ingin terselesaikan. Anggaran yang dikeluarkan untuk pengentasan kemiskinan menjadi stimulus dalam menurunkan angka kemiskinan dan beberapa persoalan pembangunan yang lain.

Pembangunan sektor pendidikan akan meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu bangsa. Peningkatan produktivitas mempunyai kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Tingkat rata-rata pendidikan masyarakat mempunyai korelasi yang berbanding lurus dengan tingkat ekonomi masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka akan semakin tinggi pula produktivitasnya, dengan kata lain jika pendidikan tinggi maka kesempatan untuk mempunyai pendapatan perkapita juga tinggi. Dan pembangunan sektor pendidikan akan mengangkat secara langsung ataupun tidak langsung sektor ekonomi. Jika sektor ekonomi saja banyak didukung oleh sektor pendidikan, apalagi dengan sektor-sektor lainnya (Todaro, 2013).

2.1.5.3 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan

Arsyad (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Oleh karena itu kesehatan yang baik akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

2.1.5.4 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hapsoro (2013) mengatakan bahwa penggunaan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan dikarenakan angka pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu wilayah tanpa memandang tingkat pendapatan tiap golongan, sehingga pertumbuhan ekonomi belaku secara menyeluruh. Sementara pertumbuhan ekonomi per kapita hanya mengukur golongan pendapatan tertentu di wilayah tertentu, sehingga dalam menganalisis kemiskinan hanya terbatas pada golongan pendapatan tertentu saja.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang di produksi di suatu daerah atau wilayah tersebut dalam satu tahun tertentu. Maka dalam pengertian tersebut dapat diartikan bahwa suatu perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut dapat membantu menaikkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut akan menyediakan modal, teknologi dan tenaga ahli kepada daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi. Beroperasinya perusahaan di daerah

tersebut akan membantu menambah barang dan jasa yang diproduksi, menambah penggunaan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Penambahan pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan menghindarkan masyarakat dari kemiskinan. Begitu juga sebaliknya, apabila penambahan produksi berkurang, penambahan tenaga kerja berkurang, maka pendapatan akan berkurang yang selanjutnya akan menyebabkan kemiskinan.

2.2 Studi Empiris

Sebagai acuan dalam penelitian ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, baik berupa pengujian hipotesis maupun pengembangan teori lebih lanjut antara lain:

Mardiana, dkk (2017) Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Serta Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran serta Tingkat Kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka. Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan pengangguran terbuka. Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kenaikan pengangguran terbuka. Peningkatan pengangguran terbuka berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan. Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan di Kalimantan Timur. Peningkatan Pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang Infrastruktur berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penurunan

Tingkat kemiskinan. Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Penurunan Kemiskinan melalui penurunan pengangguran terbuka. Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan Kemiskinan melalui penurunan pengangguran terbuka. Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan melalui peningkatan pengangguran.

Pratama dan Utama (2019) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil analisis menunjukkan pengeluaran pemerintah dan investasi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Investasi memiliki pengaruh langsung positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah dan investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Kaharuddin, dkk (2019) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017). Berdasarkan hasil regresi sederhana tentang pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskina, maka dapat ditarik kesimpulan, Variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh terhadap Pengangguran, variabel Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di

Kota Manado. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa penelitian variabel ini sudah memiliki pengaruh. Akan tetapi pengaruhnya secara simultan dapat dikategorikan masih rendah, karena hasil perhitungan menunjukkan koefisien determinasi berada dibawah angka yang seharusnya

Dony (2016) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hasil perhitungan dan analisis data, maka dapat di jelaskan bahwa 1) Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan barat, artinya semakin berkurang pengeluaran pemerintah, pengangguran semakin meningkat. Berkurangnya pengeluaran pemerintah menyebabkan tingkat pengangguran terbuka menjadi naik. Nilai koefisien parameter masing-masing pengeluaran ini bersifat inelastis, di mana persentase penurunan dalam tingkat pengangguran lebih kecil dari pada persentase peningkatan dalam pengeluaran pemerintah. Dengan demikian kinerja pemerintah dalam mengalokasikan pengeluaran tersebut belum baik dan 2) PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan barat, artinya semakin berkurang PDRB, maka pengangguran semakin meningkat, hal ini disebabkan karena sumbangan PDRB tertinggi pada aspek pertanian, aspek pertanian tidak dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga walaupun PDRB naik, tidak diikuti oleh penurunan pengangguran.

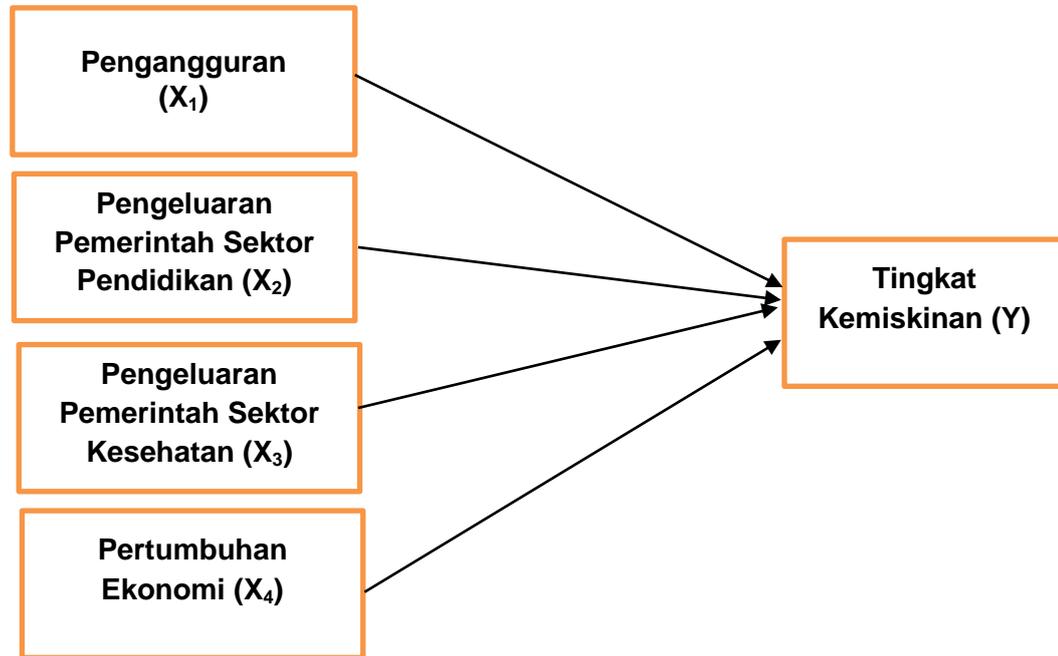
Anggara (2017) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Arfah dan Mapparenta (2018) Implementasi Pertumbuhan Ekonomi dari Segi Pengeluaran Terhadap Tingkat Pengangguran. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan tingkat belanja pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah dituntut untuk aktif dalam upaya penurunan jumlah penduduk miskin. Upaya yang diharapkan tidak hanya sekedar memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, akan tetapi juga upaya untuk memerangi kemiskinan dari akar masalahnya. Dalam penelitian ini pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi dijadikan variabel-variabel bebas yang secara parsial diduga mempengaruhi jumlah penduduk miskin Indonesia. Pengangguran mempengaruhi tingkat kemiskinan disebabkan karena produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga masyarakat harus mengurangi konsumsinya yang berefek kepada menjauh dari kesejahteraan dan beransur-ansur menuju kemiskinan. Pengeluaran pemerintah mempengaruhi kemiskinan disebabkan perannya dalam ekonomi yang dapat membantu masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan yang pro dan dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Diagram hubungan antara kemiskinan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka konseptual yang telah dijabarkan sebelumnya, maka hipotesis yang dimunculkan adalah sebagai berikut:

1. Diduga pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa.
2. Diduga pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa.
3. Diduga pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa.
4. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa.